**UPAYA DAN PERMASALAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN PASURUAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011**

Oleh
Nugrahini Susantinah Wisnujati
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

Poverty is a complex phenomenon, is multidimensional and can not be easily viewed from an absolute numbers only. Wide area and causing a big variety of cultural conditions and problems of poverty in the province of East Java became very uniq. Study is taking a deliberate location (purposive) in Pasuruan, was chosen because the district Pasuruan Pasuruan is included in the typology of the coastal region, so the research is expected to determine the condition of poverty in coastal areas. Research using sampling methods FGD at regional government level, followed by all agencies and FGDs at community level (community consultation), FGD was held on the stage Rejo village and the village of Tuban district Sekargading Bugul South District. Constraints experienced by the Government of WordPress, is because prevention programs are implemented by local governments still can not be enjoyed by many or the majority of society, poverty reduction programs in Pasuruan still overlap, this is not optimal because TKPKD role in implementing the synchronization and coordination of programs poverty reduction.

Keywords: poverty reduction, coordination

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh, upaya penanggulangan kemiskinan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat dengan mudah dilihat dari suatu angka absolut saja. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di provinsi Jawa Timur menjadi sangat beragam.

Masyarakat miskin pada umumnya ditandai dengan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam hal : (1) memenuhi kebutuhan – kebutuhan (hak –hak) dasar seperti pangan dan gizi , sandang, papan, pendidikan dan kesehatan basic need dalam kehidupan , (2) melakukan kegiatan produktif (unproductiveness) (3) menjangkau akses sosial dan ekonomi (inaccessibility) , (4) menentukan nasibnya sendiri dan selalu mendapat perlakuan diskriminatif , mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistik (vulnerability) dan (5) senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (no fredom pro poor) seperti yang dikemukakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPM) pada tahun 2002. Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan,

tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Untuk mencapai masyarakat sejahtera, demokratis dan berkeadilan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti izin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian.

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh juri JPIP (The Jawa Post Institute of Pro Otonomi) menunjukkan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah hanya mampu efektif 9,8 % menanggulangi kemiskinan , angka ini relatif kecil untuk menanggulangi kemiskinan, oleh sebab itu perlu dievaluasi upaya dan kendala penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk mengetahui kendala penanggulangan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengambil lokasi secara sengaja di Kabupaten Pasuruan, dipilih Kabupaten Pasuruan karena kabupaten Pasuruan adalah wilayah pesisir, sehingga dapat diketahui kondisi kemiskinan di wilayah pesisir. Konsultasi komunitas dilaksanakan pada kelurahan panggung rejo kecamatan Tuban dan Desa Sekargading Kecamatan Bugul Kidul. Analisis data menggunakan analisis diskriptif, yakni menguraikan hasil penelitian dengan diperjelas oleh tabel dan gambar.

Metode pengambilan data dengan menggunakan metode Focus Grup Discussion (FGD) pada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengambilan data di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan pada pertemuan SKPD atau Dinas di Kantor Walikota Pasuruan. Sekretaris TKPKD menyampaikan materi terlebih dahulu dan ditindak lanjuti dengan FGD. Pengambilan responden dilaksanakan secara sengaja, di tingkat Pemerintah daerah dan ditingkat masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010, Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka semua kota/ kabupaten berupaya untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Kabupaten Pasuruan juga berupaya menanggulangi kemiskinan dengan berbagai upaya, secara umum kondisi wilayah, keadaan penduduk dan penduduk miskinnya adalah sebagai berikut, Luas Wilayah Kota Pasuruan: 36,52 Km², Terdiri dari 3 kecamatan dan 34 kelurahan, Jumlah Penduduk: 186.322 jiwa (Tahun 2010), Laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,02%, Pendapatan perkapita penduduk Kota Pasuruan atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp. 6.468.203,-, sedangkan berdasarkan ADHB sebesar Rp. 15.118.654,-, IPM 72,97.

Pada Tahun 2010, Angkatan Kerja : 10.631 Jiwa, Tingkat Pengangguran Terbuka: 11,23% (dari Jumlah Penduduk), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi : 5,66% per Tahun, Struktur perekonomian didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, restoran dan industri pengolahan, Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS Kota Pasuruan (PPLS tahun 2008) pada tahun 2008 adalah 9.009 RTM (30.176 ARTM) dengan rincian sebagai berikut: Rumah Tangga Sangat Miskin: 1.293 RTM (14,35 %), Rumah Tangga Miskin: 3.252 RTM (36,10 %), Rumah Tangga hampir Miskin: 4.464 RTM (49,55 %).

Arah Pengentasan kemiskinan Kabupaten Pasuruan adalah Pengurangan dan pengentasan kemiskinan dalam upaya Pencapaian MDGs, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam Kerangka Pembangunan Manusia (Human Development).,

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011 (RKPD, 2011) : Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan prakarsa dan keragaman lokal, dengan menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial; Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan;

PENUTUP

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten pasuruan adalah , Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan prakarsa dan keragaman lokal, menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial; menurunkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan; serta tersedianya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang bermutu bagi penduduk miskin.

1. Kabupaten Pasuruan perlu memiliki kendala yakni peningkatkan tugas pokok dan fungsi dari TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sehingga belum dapat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan
2. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan belum optimal dalam memenuhi 11 hak dasar yang ada di Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
3. Alokasi anggaran pada ketiga cluster kelompok program belum berimbang
4. Alangkah baiknya apabila alokasi distribusi pendanaan pada cluster kelompok program dapat berimbang mengingat prosentase masyarakat sangat miskin (14,35%) relatif kecil dibanding dengan prosentase masyarakat miskin dan masyarakat agak miskin

Hal yang dapat disarankan adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi dari TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) agar dapat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan agar dapat memenuhi 11 hak dasar yang ada di Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
2. Alokasi anggaran pada ketiga cluster kelompok program secara optimal, dengan mengoptimalkan peran CSR Perusahaan
3. Alangkah baiknya apabila alokasi distribusi pendanaan pada cluster kelompok program dapat berimbang mengingat prosentase masyarakat sangat miskin (14,35%) relatif kecil dibanding dengan prosentase masyarakat miskin dan masyarakat agak miskin

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2007). Panduan Operasional P2TPD, Volume 5: Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan, Jakarta.
- Bereiter, C. (2002). Education and Mind in the Knowledge Age. Erlbaum, Hillsdale, New York.
- Budiyana, Saefullah et al. (2003). Pengorganisasian, Rakyat, Modul Pelatihan, INCIS, Jakarta.
- Ferry, Brian and Kiggins. (1999). Making Use of a Knowledge Building Community to Develop Professional Socialization, University of Wollongong.

- Gofur Abdul. (2007). Panduan Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bagi Organisasi Masyarakat Sipil, GAPRI, Jakarta.
- Roem Topatimasang. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*, Insist, Jogjakarta.
- Supartono, et al. (2007). Panduan kajian Kemiskinan Partisipatif (Participatory Poverty Assesment), GAPRI, Jakarta.
- Johanes DM Arus et al (2008). Panduan Kaji Ulang Kebijakan, GAPRI, Jakarta.